



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 4, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2025
 Reviewed : 01/12/2025
 Accepted : 06/12/2025
 Published : 20/12/2025

S.M. Riziq Almahdhar¹
 Muhammad Farrel Rafangga²
 Andi Ariq Akhdan Ziyad³
 Dian Fitriani Afifah⁴

OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MEWUJUDKAN SDGS NO POVERTY

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin pertama, yaitu No Poverty. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki kewenangan strategis dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis optimalisasi otonomi daerah melalui perencanaan program, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor dalam upaya menekan angka kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa berbagai strategi, seperti peningkatan akses layanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi produktif, serta pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial, mampu meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah daerah. Namun, tantangan berupa keterbatasan anggaran, disparitas antarwilayah, dan sinergi yang belum optimal antar pemangku kepentingan masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dengan memperkuat kapasitas daerah, meningkatkan koordinasi, dan memastikan keberlanjutan program, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berpotensi mempercepat pencapaian target SDGs terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah; Kemiskinan; SDGs; Pemerintah Kabupaten Bandung Barat; Kebijakan Publik; Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

For Poverty alleviation is one of the regional development priorities in order to realize the first point of the Sustainable Development Goals (SDGs), namely No Poverty. In the context of regional autonomy, the West Bandung Regency Government has strategic authority in designing and implementing policies that are targeted according to local needs. This research is a qualitative descriptive study that aims to analyze the optimization of regional autonomy through planning programs, institutional strengthening, and cross-sector collaboration in an effort to reduce poverty rates. The results of the analysis show that various strategies, such as increasing access to basic services, developing a local economy based on regional potential, empowerment through community productive economic programs, and utilizing integrated social welfare data, can increase the effectiveness of local government interventions. However, challenges such as budget constraints, disparities between regions, and less than optimal synergy between stakeholders still require further attention. By strengthening regional capacity, improving coordination, and achieving program objectives, the West Bandung Regency Government strives to achieve the SDGs targets, especially in reducing poverty levels significantly.

Keywords: Regional Autonomy; Poverty; SDGs; West Bandung Regency Government; Public Policy; Community Empowerment.

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran
 email: riziq24002@mail.unpad.ac.id, farrelrafangga@gmail.com, andi24005@mail.unpad.ac.id,
 dian.fitriani@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan fundamental dalam pembangunan nasional, termasuk di tingkat daerah. Meskipun angka kemiskinan Indonesia menunjukkan tren penurunan, ketimpangan antardaerah tetap menjadi tantangan serius yang menghambat pemerataan pembangunan. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh variasi kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, serta efektivitas implementasi kebijakan sosial di masing-masing daerah (Todaro & Smith, 2020; Sumarto, 2021). Dalam konteks ini, pengentasan kemiskinan menuntut pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan lokal untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil.

Penerapan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan administratif memberikan ruang yang luas bagi pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Teori desentralisasi menekankan bahwa kedekatan pemerintah daerah dengan warga memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan responsif (Rondinelli, 1981; Faguet, 2014). Namun demikian, efektivitas otonomi sangat bergantung pada kapasitas birokrasi, koordinasi antarinstansi, serta kualitas data yang digunakan dalam perencanaan. Di banyak daerah, kelemahan dalam tata kelola dan ketidaksinkronan data menjadi faktor penghambat utama upaya penanggulangan kemiskinan (World Bank, 2022).

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang menghadapi tantangan signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), tingkat kemiskinan Bandung Barat mencapai 10,49 persen, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat yang berada pada 7,46 persen. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) tercatat 1,62, menandakan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada jauh di bawah garis kemiskinan (Bappeda Jawa Barat, 2023). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kemampuan distribusi kesejahteraan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dua instansi memiliki peran strategis, yaitu Dinas Sosial sebagai pelaksana program dan Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data makro dan mikro kemiskinan. Namun, beberapa laporan menunjukkan adanya tumpang tindih data penerima bantuan, ketidaksesuaian basis data kemiskinan, serta lemahnya integrasi sistem informasi antarinstansi (BPS, 2024; Kemensos RI, 2023). Hal ini menyebabkan program tidak sepenuhnya tepat sasaran dan berpotensi menurunkan efektivitas intervensi pemerintah.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, upaya penanggulangan kemiskinan memiliki keterkaitan langsung dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 1: No Poverty, yang menargetkan penghapusan segala bentuk kemiskinan pada tahun 2030. Capaian SDGs di tingkat daerah sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, akurasi data, serta tata kelola pemerintahan yang baik (UNDP, 2021). Oleh karena itu, optimalisasi otonomi daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program sosial benar-benar sesuai dengan karakteristik lokal dan mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

Namun demikian, sejumlah tantangan struktural masih menghambat optimalisasi kebijakan daerah dalam pengentasan kemiskinan. Keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan menjadi faktor yang sering disebut sebagai penghambat utama pencapaian target SDGs (Soleh & Fitriani, 2020). Ketidaksinkronan data kemiskinan antara Dinas Sosial dan BPS juga memperlihatkan adanya policy gap antara idealisme kebijakan dan implementasi di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana otonomi daerah telah dioptimalkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini secara khusus mengkaji peran dan sinergi Dinas Sosial serta BPS dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, menilai kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta mengidentifikasi hambatan kelembagaan dan struktural yang menghambat implementasi SDGs poin 1. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

KAJIAN TEORI

1. Sustainable Development Goals (SDG's)

Agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan ini bertujuan untuk mendorong kemajuan berkelanjutan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan ini adalah untuk membangun masa depan yang lebih adil, inklusif, dan ramah lingkungan dengan tujuan dan indikator yang dapat diukur. Sampai tahun 2030, kemajuan pembangunan harus dapat dipantau dan dinilai. SDGs menekankan prinsip universal, yang berarti bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing; prinsip integrasi, yang menekankan bahwa masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan saling mempengaruhi dan berkorelasi satu sama lain; dan prinsip no one left behind, yang menekankan bahwa tidak ada kelompok yang boleh tertinggal dalam proses pembangunan.

Karena kerangka ini didasarkan pada hak asasi manusia dan pemerataan kesempatan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup setiap orang tanpa diskriminasi sambil menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Sustainable Development Goals (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan global, mencakup berbagai hal penting. Ini mencakup penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas tinggi, pekerjaan yang layak untuk semua, kesetaraan gender, akses yang terjangkau ke air dan sanitasi, energi bersih yang berkelanjutan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, perlindungan kehidupan di darat dan laut, pembangunan damai, tata kelola yang efektif, dan kolaborasi internasional. Setiap tujuan memiliki tujuan dan indikator yang berbeda.

Indikator ini memungkinkan untuk melacak kemajuan secara komparatif baik antar negara maupun antar daerah. Ini memungkinkan penyesuaian dan evaluasi rutin program kebijakan. SDGs di tingkat nasional dan daerah mendorong harmonisasi kebijakan lintas sektor dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi sipil, dan komunitas lokal agar upaya pembangunan lebih terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Analisis etika pembangunan, epistemologi pembelajaran, dan pelaporan data, serta kajian keadilan ekologis, semuanya merupakan topik penelitian tentang SDGs.

2. SDG's Point 1: No Poverty

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utamanya; ini juga dikenal sebagai SDGs, atau No Poverty. Secara keseluruhan, tujuan ini adalah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui kombinasi kebijakan sosial, program perlindungan pendapatan, akses ke layanan dasar, dan upaya pemberdayaan ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu masalah strategis yang harus ditangani dengan serius dalam konteks Bandung Barat. Menurut data BPS tahun 2024, persentase penduduk miskin di daerah ini mencapai sekitar 9,7%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat. Tingkat kemiskinan yang tinggi di Bandung Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertanian informal dan tradisional, dan keterbatasan lapangan kerja formal.

Pandemi COVID-19 juga memengaruhi masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata dan industri kecil-menengah, yang merupakan bagian penting dari ekonomi daerah. Penghapusan kemiskinan mencakup meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui lapangan kerja yang layak, pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, dan penyediaan jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial, subsidi, dan kebijakan yang membantu kelompok rentan mendapatkan akses ke layanan dasar. SDGs 1 juga menekankan bahwa data yang akurat diperlukan untuk mengamati tingkat kemiskinan, mengidentifikasi kelompok rentan, dan mengevaluasi seberapa efektif program yang dilaksanakan di daerah. Selain itu, tujuan ini menunjukkan bahwa lembaga harus transparan dan responsif terhadap perubahan ekonomi seperti krisis kesehatan, bencana, atau gangguan pasar kerja agar kebijakan dapat disesuaikan dengan cepat untuk menghentikan peningkatan kemiskinan.

Upaya daerah sejalan dengan prinsip universal SDGs, dengan penekanan pada inklusi sosial, akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, dan

dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan peluang ekonomi tanpa meningkatkan biaya hidup keluarga miskin. Secara praktis, pengembangan program di Bandung Barat harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, perusahaan swasta, komunitas lokal, dan lembaga swadaya untuk membuat rencana tindakan yang dapat diukur dan memiliki indikator kemajuan yang jelas, seperti partisipasi angkatan kerja, jumlah rumah tangga di bawah garis kemiskinan, dan akses ke layanan perlindungan sosial. Tujuan akhirnya adalah menurunkan ketimpangan serta meningkatkan kualitas hidup.

3. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Ini tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga termasuk kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, aset produktif, dan ketidakmampuan seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Berbagai teori dibahas dalam penelitian ilmu sosial dan ekonomi untuk menjelaskan berbagai jenis kemiskinan. Untuk memahami bagaimana kemiskinan muncul, bagaimana ia terus meningkat, dan intervensi apa yang paling efektif untuk mengatasinya, teori-teori ini sangat penting. Tiga teori utama tentang kemiskinan adalah kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan struktural. Teori-teori ini kemudian diikuti oleh teori lain seperti kemiskinan siklus, kemiskinan kultural, dan kemiskinan natural, yang merupakan konsekuensi dari faktor lingkungan.

Kemiskinan absolut adalah ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Rowntree (1901) adalah peneliti ekonomi klasik dan statistik sosial yang pertama kali menggunakan istilah "kemiskinan absolut", yang mengukur kemiskinan berdasarkan biaya minimum kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia sering menggunakan standar kemiskinan absolut dalam dunia modern. Bank Dunia menetapkan ambang kemiskinan ekstrem global sebesar US\$2,15 per hari (Purchasing Power Parity/PPP), sedangkan Indonesia menetapkan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum makanan per kapita sebesar 2.100 kilokalori per hari, serta kebutuhan non-makanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Individu atau rumah tangga yang pengeluarannya berada di bawah garis ini dianggap miskin absolut.

Ukuran ini sangat membantu pemerintah menetapkan tujuan penurunan kemiskinan karena sifatnya objektif. Berbeda dengan itu, kemiskinan relatif adalah ketika seseorang berada dalam posisi sosial-ekonomi yang lebih rendah daripada standar hidup rata-rata masyarakat di sekitarnya, meskipun tidak miskin secara absolut. Peter Townsend (1979) menciptakan gagasan ini, menyatakan bahwa jika seseorang tidak mampu berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan sosial yang dianggap normal oleh masyarakat, orang tersebut dianggap miskin. Oleh karena itu, kemiskinan relatif sangat terkait dengan ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan. Meskipun seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka tetap dianggap miskin relatif jika mereka memiliki akses ke pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, perumahan yang aman, atau akses ke transportasi yang mudah. Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan materi tetapi juga ketidakadilan sosial dan ketimpangan yang membatasi kemampuan seseorang untuk maju.

Namun, kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh sistem sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan yang tidak adil. Artinya, kemiskinan tidak disebabkan oleh kesalahan individu; sebaliknya, sistem yang menghalangi kelompok tertentu untuk makmur. Para ekonom pembangunan seperti Gunnar Myrdal (1957), Amartya Sen (1999), dan pendekatan strukturalis dalam ekonomi politik adalah sumber teori ini. Ketimpangan dalam pembangunan desa dan kota, birokrasi yang tidak mendukung usaha kecil, kepemilikan tanah yang tidak merata, kurangnya pendidikan berkualitas, diskriminasi, dan keterbatasan infrastruktur adalah beberapa penyebab kemiskinan struktural. Karena hambatan struktural yang tidak berubah, kemiskinan ini menyebar dari generasi ke generasi. Untuk mengatasi kemiskinan struktural, kebijakan jangka panjang, reformasi ekonomi, dan intervensi pemerintah diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif.

Oscar Lewis (1966) mempopulerkan teori kemiskinan kultural, selain ketiga teori utama tersebut. Teori ini menyatakan bahwa pola pikir, nilai, kebiasaan, dan perilaku yang diwariskan dari budaya yang mengalami kemiskinan dapat menyebabkan kemiskinan muncul dan bertahan. Misalnya, menjadi pasrah, tidak memiliki keinginan untuk berubah, atau bergantung pada

bantuan orang lain. Teori ini sering dikritik karena sering menyalahkan korban dan mengabaikan faktor - faktor struktural.

Sebaliknya, teori kemiskinan siklus, atau kemiskinan siklus, mengatakan bahwa rumah tangga miskin lebih sulit keluar dari kemiskinan karena siklus berulang, seperti krisis ekonomi, fluktuasi harga komoditas, bencana alam, dan kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan natural adalah teori lain yang relevan yang menekankan bagaimana faktor - faktor lingkungan fisik, seperti lokasi geografis, minimnya sumber daya alam, rawan bencana, atau keterpencilan wilayah, memengaruhi tingkat kemiskinan.

4. Indikator Kemiskinan menurut BPS

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator kemiskinan didasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar, yaitu pendekatan kebutuhan dasar yang menilai kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Pendekatan ini menggunakan tiga indikator utama, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Dalam statistika sosial, ketiga indikator tersebut merupakan bagian dari metode FGT (Foster-Greer-Thorbecke), yang secara luas digunakan untuk mengukur intensitas, kedalaman, dan distribusi kemiskinan dalam suatu wilayah.

Menurut data yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2024, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat yang miskin adalah 9,87%. Ini menunjukkan bahwa hampir satu dari sepuluh orang masih hidup di bawah Garis Kemiskinan. Menurut Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat tahun 2024, nilai P1 sebesar 0,70 menunjukkan bahwa penduduk miskin di daerah ini rata-rata masih memiliki kesenjangan pengeluaran yang cukup besar dibanding ambang standar minimum. Sementara itu, nilai P2 sebesar 0,23 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin tidak terlalu ekstrem, meskipun masih ada beberapa kelompok yang kondisinya lebih buruk daripada rata-rata.

Secara keseluruhan, ketiga indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan kemiskinan yang bukan hanya terkait dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga terkait dengan kualitas hidup. Data BPS juga menunjukkan tren positif dari sisi jumlah, dengan jumlah penduduk miskin turun dari 183,70 ribu pada 2022 menjadi 179,40 ribu pada 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan dan optimalisasi otonomi daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, khususnya dalam konteks pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) poin 1, yaitu No Poverty. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mengungkap angka atau tren kemiskinan, tetapi juga memahami proses, dinamika kebijakan, serta interaksi antarinstansi yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), yang merupakan aktor kunci dalam penyediaan data, pelaksanaan program, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk melihat pelaksanaan program secara langsung, serta mengumpulkan dokumentasi dan data sekunder dari berbagai laporan resmi yang relevan dengan fokus penelitian.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi untuk memilih informasi yang paling relevan dengan isu otonomi daerah, tata kelola, dan strategi penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan, dinamika koordinasi antarinstansi, serta efektivitas implementasi program kemiskinan di tingkat daerah. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi berkelanjutan dengan membandingkan berbagai sumber data guna memastikan validitas temuan. Dengan demikian, metodologi ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengoptimalkan kewenangan otonomi daerah untuk mewujudkan SDGs No Poverty.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap Indikator Risiko Kemiskinan atau Terpinggirkan Berdasarkan IPM di Kabupaten Bandung Barat 2010-2024

Menurut Soman Wisnu Dharma dalam buku Pengukuran Kemiskinan dan Informasi Di Baliknya salah satu penilaian risiko kemiskinan adalah usia harapan hidup. Maka berdasarkan indikator tersebut penduduk berisiko miskin atau terpinggirkan berada pada tingkat terendah di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010 dari 15 tahun terakhir yang kami teliti. Nilai tertinggi muncul pada 2024. Terjadi kenaikan di semua kategori pada setiap tahunnya di Kabupaten Bandung Barat. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023.

Analisis indikator penduduk miskin menunjukkan pola yang sama. Kategori usia harapan hidup mengalami peningkatan indikator pada 2024 dibandingkan 2010. Peningkatan terbesar sebesar 0,31 poin terjadi di tahun 2023. Situasi yang membaik dan variasi yang meningkat terlihat setiap tahun.

Pada indikator harapan lama sekolah, terdapat pula peningkatan yang signifikan. Nilainya naik dari 10,53 pada 2012 menjadi 11 pada 2013. Kondisi terburuk pada 2010 dengan 9,68 poin. Setiap tahun mencatat kenaikan indikator. Namun, perbedaan setiap tahunnya perlu diperhatikan. Pada empat tahun pertama, perbedaan tergolong besar. Pada tahun-tahun berikutnya perbedaan bervariasi mulai dari 0,01 sampai 0,33 poin.

Indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan nilai terbaik atau tertinggi pada 2024 dengan 8,24 tahun. Kondisi terburuk muncul pada tahun 2010 dengan 7,03 poin. Terjadi peningkatan setiap tahunnya. Nilainya meningkat dari kurang dari 8 tahun menjadi lebih dari 8 tahun pada 2024. Tercatat peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan 0,3 tahun.

Pengeluaran per kapita (ribu/orang/tahun) juga menjadi indikator penilaian risiko kemiskinan. Kondisi terburuk muncul pada 2010 dengan pengeluaran per kapita setiap orangnya Rp6.702. Tercatat kondisi terbaik pada 2024 dengan pengeluaran per kapita Rp9.583.



Empat indikator yang dianalisis menunjukkan perubahan penting dalam dinamika pembangunan manusia dan risiko kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat selama lima belas tahun terakhir. Seluruh indikator meningkat dan menggambarkan perbaikan kapasitas dasar penduduk. Namun peningkatan ini tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan, sehingga analisis memerlukan bingkai teori ilmu pemerintahan untuk memahami bagaimana kebijakan publik memengaruhi arah perubahan tersebut.

Peningkatan usia harapan hidup menunjukkan adanya perbaikan layanan kesehatan, gizi, dan lingkungan. Perubahan ini berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Pemerintah daerah menjalankan peran sebagai penyedia dan penjamin layanan dasar. Kenaikan terbesar pada 2023 memberi sinyal bahwa kebijakan kesehatan atau program perlindungan sosial pada periode tersebut berjalan lebih efektif. Meskipun demikian, meningkatnya indikator ini tidak serta-merta menandakan pemerataan kinerja pelayanan. Kelompok rentan tetap menghadapi hambatan yang tidak tampak dalam angka agregat.

Indikator harapan lama sekolah turut menunjukkan peningkatan signifikan. Kenaikan dari 9,68 tahun pada 2010 menjadi lebih dari 11 tahun pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan penguatan fungsi pemerintah dalam pelayanan pendidikan. Pemerintah wajib mengelola

keseimbangan antara akses, mutu, dan keberlanjutan layanan. Peningkatan tajam pada 2012–2013 dapat mencerminkan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif atau pendanaan yang lebih tepat sasaran. Variasi antartahun menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum stabil di awal periode.

Rata-rata lama sekolah yang meningkat dari 7,03 menjadi 8,24 tahun mencerminkan hasil dari fungsi pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat. Pendidikan adalah alat untuk meningkatkan kapasitas warga agar mampu berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Nilai yang masih berada di kisaran pendidikan menengah pertama mengindikasikan bahwa pemberdayaan belum optimal. Kondisi ini membuat sebagian penduduk tetap berada dalam kerentanan ekonomi.

Pengeluaran per kapita yang meningkat dari Rp6.702 menjadi Rp9.583 menunjukkan perbaikan daya beli, tetapi tetap harus dibaca dalam kerangka kebijakan fiskal daerah. Pemerintah daerah memegang peran dalam mengatur alokasi anggaran, termasuk program bantuan sosial, subsidi, serta pembiayaan layanan dasar. Peningkatan daya beli tidak hanya mencerminkan pendapatan yang naik, tetapi juga efektivitas intervensi pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin. Namun jika peningkatan pengeluaran tidak melampaui tekanan inflasi, rumah tangga tetap berada dalam posisi rentan.

Secara keseluruhan, peningkatan seluruh indikator menggambarkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia. Namun keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari perubahan angka, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan secara seimbang. Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan kemajuan, tetapi ketimpangan peningkatan indikator memperlihatkan bahwa kelompok tertentu belum memperoleh manfaat yang setara. Hal ini menegaskan pentingnya penyempurnaan tata kelola kebijakan, terutama dalam penyaluran bantuan sosial dan peningkatan layanan dasar, agar pengurangan risiko kemiskinan dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pelaksanaan SDGs poin 1 (No Poverty) di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan kuantitatif jumlah penduduk miskin, permasalahan kemiskinan masih berlangsung secara struktural dan multidimensional. Tingginya tingkat kemiskinan yang mencapai 10,49 persen pada tahun 2024, serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih relatif tinggi, menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi daerah belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan kelompok rentan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa optimalisasi otonomi daerah belum berjalan secara maksimal, terutama dalam penerjemahan kewenangan lokal ke dalam kebijakan yang mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat terletak pada lemahnya koordinasi antarinstansi, ketidaksinkronan data kemiskinan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program. Meskipun indikator pembangunan manusia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, manfaat peningkatan tersebut belum dirasakan merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan SDGs No Poverty, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan integrasi data lintas sektor, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat agar strategi pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia 2024. BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2024). Kabupaten Bandung Barat dalam angka 2024. BPS KBB.
- Bank Dunia. (2022). Poverty overview & global poverty line. World Bank.
- Chambers, R. (1983). Rural poverty: Unperceived problems and invisible people. *World Development*, 11(3), 245–265.
- Lewis, O. (1966). The culture of poverty. *Scientific American*, 215(4), 19–25.
- Myrdal, G. (1957). *Economic theory and underdeveloped regions*. Duckworth.

- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2024). Laporan penanggulangan kemiskinan daerah (TPKD). Pemda KBB.
- Rowntree, B. S. (1901). *Poverty: A study of town life*. Macmillan.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom*. Penguin Books.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *SDGs Indonesia report*.